

BAB I PENDAHULUAN

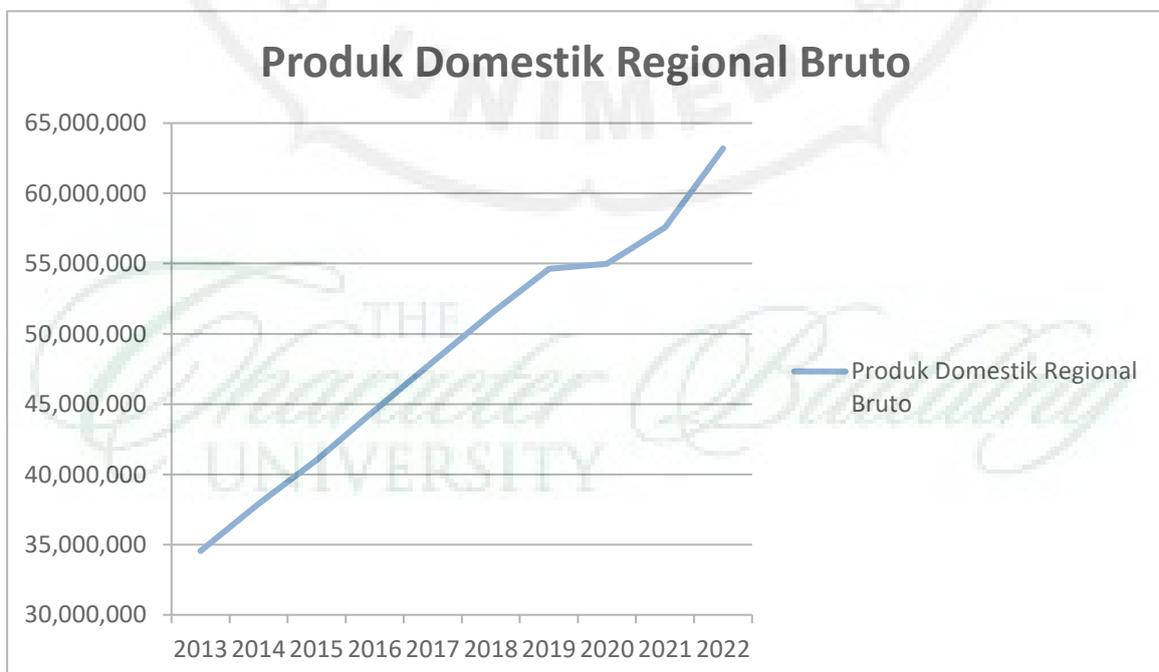
1.1. Latar belakang

Bangsa Indonesia secara umum dikenal oleh negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat karena memiliki banyak sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi dalam negeri maupun internasional. Indonesia dapat dikatakan sedang berada dalam fase transisi dan sedang menuju tingkat kemakmuran yang lebih tinggi jika pembangunan ekonomi negara ini menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Jika pembangunan ekonomi Indonesia terus mengalami tren peningkatan seperti saat ini, maka transformasi ini akan terjadi. Ada kemungkinan pemerintah Indonesia akan mengalami masa gejolak atau resesi sebagai akibat dari kesulitan yang dihadapi sepanjang kemajuan ekonomi tahun lalu. Kelesuan ekonomi dan penurunan aktivitas ekonomi dialami Indonesia selama tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat langsung dari epidemi COVID-19. Kejadian ini sebanding dengan kejadian yang terjadi pada tahun ini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan rekan-rekannya (2020), semakin banyaknya orang yang saat ini tidak memiliki pekerjaan menyebabkan penurunan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk.

Karena memiliki korelasi langsung dengan kinerja ekonomi secara keseluruhan dan sangat relevan bagi pemerintah dan masyarakat umum, laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang paling signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator terpenting tersendiri. Peran laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pertumbuhan itu sendiri semakin penting. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang kebutuhan ekonomi suatu negara, penting untuk menyelidiki periode waktu terjadinya produksi produk domestik regional bruto (PDRB). Seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) negara tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk setiap provinsi kemudian ditetapkan setelah hal ini dipahami untuk menjamin bahwa didistribusikan secara konsisten. Dengan memanfaatkan aturan ekonomi yang mengatur keadaan suatu wilayah tertentu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan perluasan ekonomi suatu wilayah tertentu. Bila suatu daerah terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan bagi perekonomiannya, daerah tersebut dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan cara yang mendorong pertumbuhan penduduk dan keberhasilan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah berbanding lurus dengan kebutuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan hubungan langsung. Setiap provinsi diharapkan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi selama proses pembangunan atau selama proses itu sendiri..

Grafik 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Berdasarkan Harga
Berlaku (Triliun Rupiah) Tahun 2013 -2022

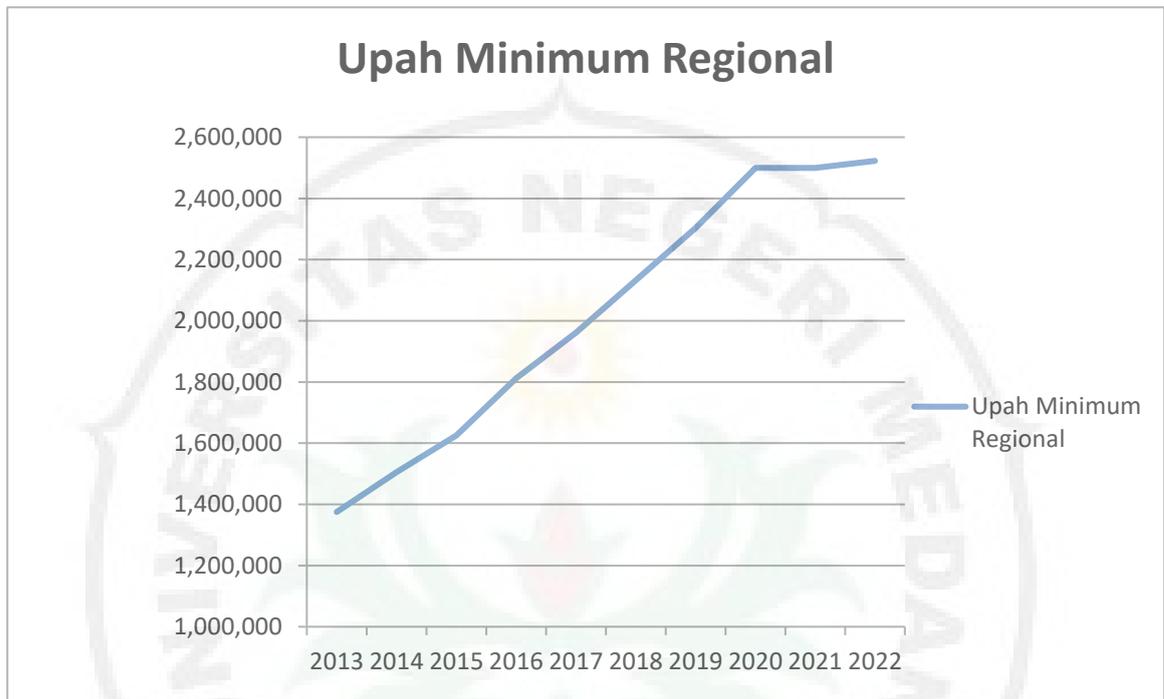


Sumber: BPS Sumatera Utara

Dari satu tahun ke tahun berikutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditunjukkan pada grafik di atas. Angka ini didasarkan pada harga berlaku dan terus meningkat selama bertahun-tahun. 34.544.178 triliun rupiah adalah Produk Domestik Bruto pada tahun 2013, dan telah meningkat secara progresif setiap tahun sejak saat itu. Telah mencapai 63.194.182 triliun rupiah pada tahun 2022. Ada beberapa penyebab yang berkontribusi terhadap PDRB, dan salah satunya adalah gaji rendah yang diterima pekerja (juga dikenal sebagai Upah Minimum Regional, atau UMR). Menurut Panjawa & Soebagiyo (2014) UMR adalah indikator yang digunakan untuk mempelajari tingkat kemiskinan. Tingkat gaji merupakan komponen signifikan yang memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja sebagai semacam imbalan atas kerja keras atau upaya yang telah mereka lakukan. Asuransi sangat penting karena merupakan sumber pendapatan utama bagi para pekerja dan keluarga mereka, dan wajib dimiliki karyawan agar dapat menutupi pengeluaran sehari-hari.

Secara umum, daerah dengan UMR yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat konsumsi dan taraf hidup yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan UMR yang lebih rendah cenderung memiliki taraf hidup dan konsumsi yang lebih rendah. Dengan pemberian UMR yang sesuai, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Adanya hubungan antara UMR dengan PDRB, yaitu upah berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan output. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat akibat peningkatan produktivitas dan produksi.

Grafik 1.2
Data Upah Minimum Regional Provinsi Sumatera Utara
(Juta Rupiah) Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gaji minimum regional di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dari data yang tersedia pada grafik di atas. Gaji minimum di daerah tersebut sekitar Rp1.375.000 pada awal tahun 2013, dan terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa henti. Selain itu, diantisipasi bahwa upah minimum regional untuk provinsi tersebut akan mencapai Rp2.522.610 pada akhir tahun 2022. Diantisipasi bahwa penerapan upah minimum regional juga akan menghasilkan peningkatan kepuasan karyawan, yang akan berkontribusi pada peningkatan produksi produk konsumen di pasar domestik. Hal ini karena upah minimum akan diterapkan di seluruh daerah.

Pada saat yang sama, Menurut Mahroji & Nurkhasanah, (2019) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor yang memiliki efek merugikan pada Produk Domestik Regional Bruto Daerah. Elemen lain yang berkontribusi terhadap masalah tersebut adalah proporsi upah minimum di sekitar daerah. Menurut Solow salah satu faktor terpenting dalam pembangunan ekonomi modern adalah IPM.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa populasi yang melakukan pembangunan yang bermanfaat mampu berinovasi dan meningkatkan jumlah komponen manufaktur yang dapat diakses. Lebih jauh, tingkat pembangunan sumber daya manusia yang tinggi menghasilkan populasi yang lebih besar, yang pada gilirannya, mengarah pada pertumbuhan konstan dalam total konsumsi. Siklus ini berlanjut hingga populasi tersebut terserap sepenuhnya.

Perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara individu adalah jenis usaha lain yang berpotensi berkontribusi pada perluasan ekonomi. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang sekarang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), "pembangunan manusia adalah indikator yang paling penting." Pernyataan ini dibuat dengan mengacu pada kualitas sumber daya manusia. Pengenalan indeks ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks ini memberikan kerangka kerja untuk pengembangan tiga aspek pembangunan manusia: pertama, aspek kesehatan, berdasarkan harapan hidup; kedua, aspek pendidikan, berdasarkan tingkat literasi individu di akhir usia belasan dan awal dua puluhan; dan ketiga, aspek daya beli, yang mencerminkan standar hidup berdasarkan paritas daya beli (UNDP, 2004).

Dalam konteks kapasitas penduduk untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik yang terkait dengan teknologi maupun kelembagaan, sebagai strategi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tingkat pembangunan manusia yang tinggi merupakan elemen penting yang memengaruhi kemampuan penduduk untuk melakukannya. Hal ini karena kapasitas penduduk untuk melakukannya berbanding lurus dengan tingkat pembangunan manusia. Menurut Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan ukuran laju pembangunan sumber daya manusia di provinsi tersebut, diantisipasi bahwa tingkat pertumbuhan akan meningkat antara tahun 2013 dan 2022. Seperti dapat dilihat pada Grafik 1.3, yang dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 1.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara
(Persen) Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, baik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan sejak awal bulan terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh data yang disajikan pada Tabel 1.3. Pada awal tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai sebesar 68,38 persen, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 74,51 persen hingga tahun 2022.

Dalam proses penentuan keberhasilan program pembangunan suatu daerah, salah satu kriteria terpenting yang harus diperhatikan adalah peningkatan produksi barang domestik regional bruto. Oleh karena itu, setiap daerah harus berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan peningkatan produksi barang domestik regional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk asli. Untuk menilai kinerja tenaga kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDB) suatu daerah, setiap pimpinan pemerintahan harus terlebih dahulu menunjukkan kapasitas pribadinya. Tujuan dari proposal ini adalah untuk melakukan analisis

terhadap kemampuan operasional pemerintah dan organisasi lain yang terkait dengan pokok bahasan.

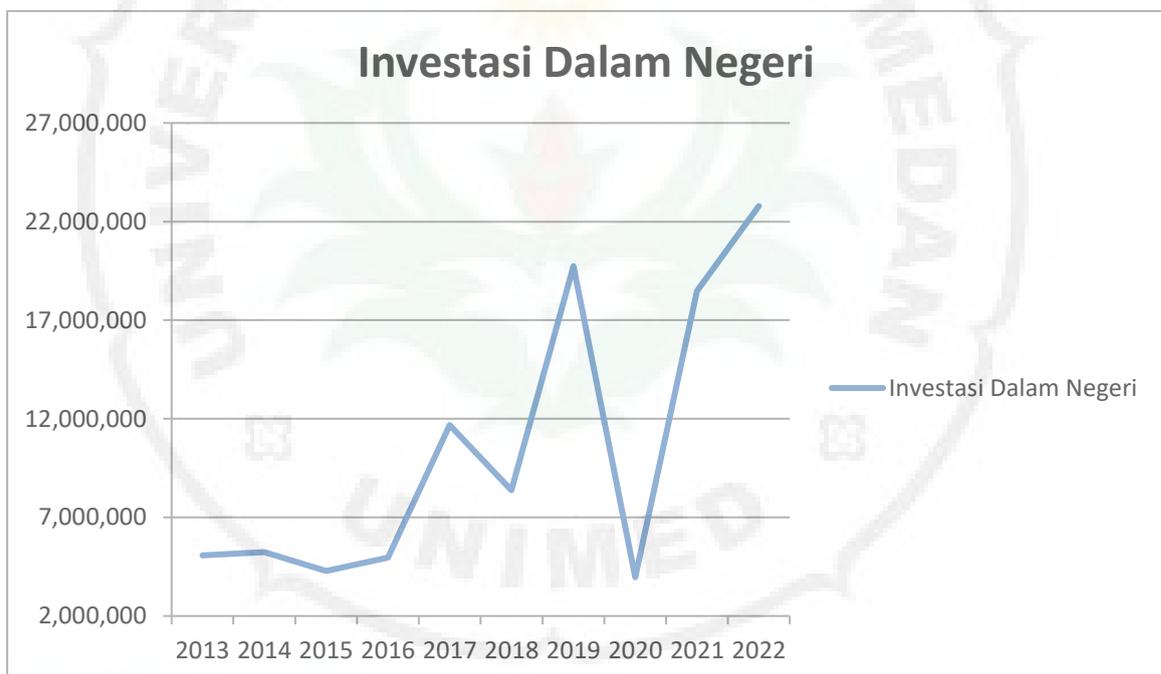
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan metrik penting untuk meningkatkan pembangunan daerah di berbagai sektor ekonomi. Hal ini karena secara akurat mencerminkan keadaan ekonomi saat ini sekaligus menunjukkan perubahan ekonomi yang akan datang. Hal ini karena keadaan khusus ini berdampak positif pada laju produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya berdampak positif pada laju perolehan pangsa pasar. Dalam waktu singkat, pertumbuhan ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk.

PDRB dipengaruhi oleh banyak elemen, termasuk Indeks Pembangunan Manusia, investasi di pasar perumahan domestik, dan bentuk pertimbangan lainnya. Menurut model Harrod-Domar, investasi dalam negeri merupakan komponen penting dalam proses pengembangan sistem ekonomi yang stabil. Investasi merupakan langkah pertama dalam proses membangun sesuatu, sedangkan jenis investasi lainnya merupakan kontributor paling signifikan terhadap proses pembangunan sesuatu di suatu wilayah tertentu (Zaris, 1987). Langkah pertama dalam proses membangun sesuatu adalah proses memutuskan apa yang akan diinvestasikan. Untuk tujuan investasi, ada dua jenis dana yang dapat digunakan: publik dan swasta. Dalam konteks ekonomi, istilah "investasi" mengacu pada proses perolehan bahan baku dan modalitas melalui penggunaan modalitas dengan tujuan menghasilkan modalitas baru yang akan digunakan dalam produksi barang dan jasa di masa mendatang. Penciptaan kesempatan kerja baru dan stimulasi pengembangan perusahaan dalam skala dunia merupakan contoh kontribusi yang dapat diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Investasi dalam negeri (IDN) berpotensi menjadi katalisator bagi kedua hasil yang berbeda ini.

Provinsi yang terletak di pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar bagi investor karena memiliki sumber daya alam yang relatif besar. Agar potensi yang sedang dibicarakan dapat dimanfaatkan, pemerintah daerah harus membuat pengumuman publik mengenai investasi yang tidak hanya

menguntungkan pemerintah tetapi juga berbagai investor. Penciptaan iklim usaha nasional yang kondusif dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan investasi yang berpotensi meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas jangkauan peluang investasi. Terjadinya hal ini di masa mendatang akan menimbulkan kebutuhan investasi di dalam negeri. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan investasi di dalam negeri akan ditunjukkan pada grafik di bawah ini. .

Grafik 1.4
Investasi Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Utara (Triliun Rupiah) Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Sumatera Utara

Informasi yang ditampilkan pada Grafik 1.4 yang dapat dilihat pada bagian paling atas halaman ini menunjukkan bahwa Investasi Dalam negeri Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 dan 2020 akibat pandemi Covid-19 namun setelah Covid-19 telah berakhir Investasi Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan yang drastis juga dikarenakan keuangan para investor sudah membaik sehingga para investor kembali menanamkan modalnya.

Terkait dengan variabel-variabel yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai

" Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia dan Investasi Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PDRB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya meningkat namun dari segi persentase pertumbuhannya menurun.
2. UMR Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya.
3. IPM Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan persentase setiap tahun.
4. Investasi dalam negeri Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dan kenaikan drastis.

1.3. Batasan masalah

Penulis bermaksud untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan variabel Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi Dalam Negeri dalam kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Hal ini berdasarkan pada latar belakang informasi yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.4. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016), rumusan masalah dapat disamakan dengan rumusan pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan data. Rumusan masalah berikut akan menjadi titik fokus utama pembahasan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diberikan:

1. Apakah Upah Minimum Regional berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Investasi Dalam Negeri berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Investasi Dalam Negeri berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Utara ?

2.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), tujuan penelitian adalah untuk menemukan, menjelaskan, dan mengembangkan suatu masalah atau kumpulan informasi melalui penggunaan prosedur ilmiah.

Berikut ini adalah tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Investasi Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara.



1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk lebih memahami pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, dan rasio Investasi Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi instansi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan tentang peningkatan Produk Domestik Regional Bruto terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara.

3. Manfaat Akademik

Pembaca yang tengah meneliti tentang variabel yang mempengaruhi PDRB diharapkan memperoleh manfaat dari penambahan kajian ini ke dalam kumpulan informasi yang ada. Selain itu, kajian ini akan memberikan kontribusi bagi sumber daya ilmiah komunitas akademis dengan membahas aspek-aspek penting seperti Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, dan peran Investasi Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara.

